

KEGAGALAN KEBIJAKAN PROGRAM SATU KELUARGA SATU SAPI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas***



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

ABSTRAK

Indri Mardian Eka Putri, 2110841022, Kegagalan Kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sapi di Kabupaten Solok Selatan, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. Dibimbing oleh: Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 200 halaman dengan 10 buku teori, 9 buku metode, 7 jurnal 4 skripsi, 6 internet dan 7 dokumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab kegagalan kebijakan Program Satu Keluarga Satu Sapi sebagai program unggulan kepala daerah di Kabupaten Solok Selatan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan, yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan peternakan. Program Satu Keluarga Satu Sapi menjadi salah satu wujud konkret dari visi tersebut, sekaligus merupakan janji politik kepala daerah saat kampanye, dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani sebagai sasaran utama program, dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Program ini dinilai relevan karena selaras dengan mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendampingan teknis yang kurang optimal, hingga lemahnya mekanisme pengawasan.

Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan teori siklus kebijakan dari Paul Cairney, yang didasarkan pada enam tahapan kebijakan publik, yaitu penetapan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pemeliharaan, pergantian atau penghentian kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program mengalami kegagalan pada sejumlah tahapan penting kebijakan publik. Pada tahapan identifikasi masalah dan seleksi isu prioritas lebih menekankan aspek politik sebagai bentuk dari janji kampanye kepala daerah, sehingga tidak didukung oleh kajian teknis yang memadai. Sementara itu pada tahap legitimasi kebijakan, prosesnya lebih dipengaruhi oleh dominasi politik, dengan lemahnya fungsi pengawasan legislatif yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol. Pada tahap implementasi, berbagai kendala teridentifikasi, keterbatasan sumber daya, distribusi sapi yang tidak sesuai kontrak, minimnya pendampingan, serta rendahnya frekuensi monitoring dan evaluasi. Kondisi tersebut memperlebar *implementation gap* dalam kebijakan publik bahkan ditemukan penyimpangan hukum. Program akhirnya dihentikan dengan alasan efisiensi anggaran, meskipun faktor utama kegagalan terletak pada lemahnya perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Kata Kunci: Kegagalan Kebijakan, Program Satu Keluarga Satu Sapi, Kabupaten Solok Selatan

ABSTRACT

Indri Mardian Eka Putri, 2110841022, The Failure of the One Family One Cow Program Policy in South Solok Regency, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Science, University of Andalas, Padang 2025. Under the guidance of Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, M.PA, and Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA. This research consists of 200 pages and 10 theory books, 9 method books, 7 journals, 4 theses, 6 internet sources, and 7 documents.

The aim of this research is to acknowledge what the causes of the failure of the One Family One Cow program were as a top-tier program of the Regent in South Solok Regency. The background study of this research emerged from the Regent's vision and mission, which is inscribed in the South Solok Regency RPJMD, emphasizing the enhancement of society's prosperity through agriculture and ranch sectors. The Suka Sapi Program becomes one of the concrete forms of its vision, and it is also a political pledge of the regent during the campaign. This program is implemented for two periods, which are 2021 and 2023, with the society involved in the farmers group as the main target of this program and the South Solok Regency Department of Agriculture and Food Security as the regional apparatus organization, the guardian who is responsible for its implementation. This program is examined as relevant because it is in accordance with the South Solok Regency society's livelihood, whose majority are working in the agriculture and ranch sectors. However, in its implementation are discovered various challenges, for instance, the limitation of human resources, suboptimal technical assistance, and also poor surveillance and control mechanisms.

This research uses the policy cycle theory of Paul Cairney, based on six stages of public policy, which are agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, policy evaluation, and policy maintenance, succession, or termination. This research uses a qualitative descriptive approach, and the method of collecting data is through interviews, observation, and documentation. The informant selection of this research uses the purposive sampling technique and the data validity technique by using source triangulation. The research's results show that the program failed at several stages of the public policy cycle. At the problem identification and issue selection stages, the political aspects are emphasized as regional head campaign promises without adequate technical studies. Policy legitimacy is influenced by political dominance with weak legislative oversight functions. At the implementation stage, limited resources, cattle distribution that does not comply with the contract, minimal assistance, and low frequency of monitoring and evaluation widen the implementation gap, and legal irregularities have even been found. The program was eventually discontinued on grounds of budget efficiency, although the main factors of failure lay in weak planning, implementation, and evaluation.

Keywords: Policy Failure, The One Family One Cow Program, South Solok Regency